

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

*Evaluation Of Industrial Area Development Policies In Gondang District,
Sragen Regency*

Tamara Dita Fitriananda¹⁾, Aris Tri Haryanto²⁾

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Slamet Riyadi

tamara.fitriananda@gmail.com

Abstrak

Sektor industri memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kabupaten Sragen sebagai daerah otonom menerapkan industrialisasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Gondang-Sambungmacan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori William N. Dunn yang mencakup enam indikator: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan kawasan industri telah memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui multiplier effect berupa peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan usaha pendukung seperti kos-kosan dan warung makan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek stabilitas pekerjaan dan mekanisme partisipasi masyarakat yang perlu diperbaiki untuk memastikan keberlanjutan program.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, Kebijakan Industri, Pembangunan Ekonomi.

Abstract

The industrial sector plays a crucial role in economic development, particularly in addressing issues of poverty, unemployment, and income distribution inequality. Sragen Regency, as an autonomous region, implements industrialization to improve the quality of life for its community through Regional Regulation Number 15 of 2023 concerning the Detailed Spatial Plan for the Gondang-Sambungmacan Industrial Area. This study aims to evaluate the policy of industrial area development in Gondang District using a qualitative descriptive method with data obtained from interviews, observations, and documentation. The analysis is conducted using William N. Dunn's theory, which includes six indicators: Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. The research findings show that industrial area development policy has provided positive impacts for the community through multiplier effects in the form of increased employment opportunities, growth of supporting businesses such as boarding houses and food stalls, as well as increased community income. However, challenges remain in aspects of job stability and community participation mechanisms that need

improvement to ensure program sustainability.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Responsiveness, Industrial Policy, Economic Development.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Sragen menjadikan sektor industri pengolahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi,ukti dari kontribusi lapangan usaha ini yang mencapai 39,58% terhadap PDRB dan menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,23% pada 2023 [BPS, 2024]. Untuk mempercepat akselerasi investasi, Pemerintah Kabupaten Sragen menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan . RDTR tersebut mengalokasikan ± 750 ha lahan industri, 10 ha di antaranya berada di Kecamatan Gondang yang berlokasi strategis di koridor tol Trans-Jawa dekat gerbang keluar Sambungmacan, sehingga menarik minat investor baru seperti pabrik alas kaki berskala ekspor .

Keberadaan kawasan industri diyakini akan memunculkan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan lokal, dan tumbuhnya usaha pendukung. Namun, pengembangan wilayah industri juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial-lingkungan—mulai dari alih fungsi lahan sawah produktif hingga risiko pencemaran—yang perlu disikapi melalui kebijakan publik yang terukur dan berkelanjutan (Dunn, 1999). Evaluasi kebijakan

pengembangan kawasan industri di Gondang menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berbagai studi di Indonesia telah mengevaluasi kebijakan kawasan industri menggunakan pendekatan enam kriteria William N. Dunn—efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan—pada konteks daerah berbeda. Penelitian di Kawasan Industri Suge, Belitung menunjukkan potensi investasi terhambat oleh minimnya infrastruktur pendukung . Evaluasi di Kawasan Industri Bantaeng menekankan pentingnya penyelarasan komunikasi antar-aktor dan kesiapan sumber daya manusia lokal . Sementara itu, studi di Tanjung Buton, Siak menemukan perlunya perbaikan kinerja lembaga pengelola serta strategi pemasaran kawasan . Meskipun berkontribusi memperkaya literatur, riset-riset tersebut belum menyoroti dinamika kawasan industri yang terintegrasi dengan jaringan jalan tol Trans-Jawa seperti di Gondang-Sambungmacan, serta belum menilai intensitas partisipasi publik dalam setiap fase pengembangan.

Penelitian ini menawarkan tiga kebaruan utama.

1. **Konteks spasial baru:** Memfokuskan evaluasi pada kawasan industri yang berada di simpul koridor logistik nasional—exit tol Sambungmacan—yang belum banyak dikaji sebelumnya.

2. **Pendekatan evaluatif komprehensif:** Menggabungkan enam kriteria Dunn dengan analisis spasial RDTR dan data mikro BPS untuk menilai keterkaitan antara capaian kebijakan, perubahan penggunaan lahan, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat.

3. **Model partisipasi masyarakat:** Menguji mekanisme *public hearing* dan *grievance mechanism* yang diatur dalam Perbup 15/2023 sebagai variabel efisiensi dan responsivitas, sehingga menghasilkan rekomendasi peningkatan kualitas tata kelola kawasan industri yang berbasis kolaborasi multistakeholder.

1. Potensi dan Tantangan Pengembangan

Data sektor industri di Kabupaten Sragen menunjukkan pertumbuhan yang beragam dari 2015 hingga 2023. Pada tahun 2023, ekonomi Sragen tumbuh sebesar 5,23%, dengan kontribusi terbesar dari sektor industri pengolahan yang mendominasi struktur ekonomi dengan kontribusi 39,58%. Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi kawasan industri

yang telah ditetapkan.

2. Dampak Sosial Ekonomi

Pengembangan kawasan industri membawa dampak ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, memberikan peluang kerja dan peningkatan ekonomi lokal, namun di sisi lain dapat menimbulkan perubahan sosial, masalah lingkungan, dan kesenjangan dalam distribusi manfaat. Perubahan yang paling signifikan adalah pergeseran dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern yang lebih individualistik.

a. Multiplier Effect

Keberadaan kawasan industri diharapkan dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan lokal, dan tumbuhnya usaha pendukung seperti perdagangan dan jasa.

b. Perubahan Struktur Ekonomi

Transformasi dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi industri menciptakan diversifikasi mata pencaharian yang dapat meningkatkan resiliensi ekonomi masyarakat lokal.

3. Dampak Primer dan Sekunder

Dampak primer mencakup perubahan langsung seperti pola produksi, tingkat pendapatan, dan penggunaan lahan, sedangkan dampak sekunder berkaitan dengan perubahan sistem sosial masyarakat sebagai konsekuensi dari dampak primer.

a. Tantangan Implementasi

Pengembangan kawasan industri juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan dampak lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pemerataan distribusi manfaat ekonomi.

b. Urgensi Penelitian

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang menjadi fokus penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Melalui Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043, pemerintah daerah berupaya menciptakan kawasan industri yang dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisa fenomena evaluasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami fenomena tentang dampak sosial dan ekonomi pembangunan kawasan industri yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan narasi yang mendalam.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Gondang merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai area pengembangan industri berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043.

Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode yang memilih sampel tertentu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan atau masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan agar data yang diperoleh lebih representatif dari populasi yang diteliti. Informan penelitian terdiri dari:

1. Kepala dan staf yang terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen
2. Kepala kantor Kecamatan Gondang dan staf terkait
3. Masyarakat Kecamatan Gondang yang terdiri dari:
 - Karyawan pabrik yang bekerja di kawasan industri
 - Masyarakat yang tidak terikat dengan industri namun merasakan dampak keberadaan kawasan industri
 - Tokoh masyarakat setempat

Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Data primer mencakup informasi mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait evaluasi kebijakan pengembangan kawasan industri.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi resmi, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, publikasi resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

Wawancara Mendalam (In-depth Interview). Menurut Sugiyono (2014), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk menemukan masalah yang perlu diteliti atau ketika peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam dari sejumlah kecil responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang disesuaikan dengan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat.

Observasi Langsung, dilakukan untuk mengamati kondisi faktual di lapangan terkait implementasi kebijakan pengembangan kawasan

industri, aktivitas masyarakat, kondisi lingkungan, dan dampak yang dapat diamati secara langsung.

Studi Dokumentasi, dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi seperti Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2023, laporan BPS Kabupaten Sragen, data kependudukan Kecamatan Gondang, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga alur kegiatan:

Kondensasi Data (Data Condensation), merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn.

Penyajian Data (Data Display), merupakan proses pengorganisasian dan pengintegrasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman situasi yang terjadi dan analisis lebih lanjut.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification), merupakan tahap akhir analisis data di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian dan melakukan verifikasi

terhadap keabsahan data yang telah diperoleh.

Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (1999) dengan enam kriteria evaluasi, yaitu:

1. *Efektivitas (Effectiveness)*: mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2. *Efisiensi (Efficiency)*: menilai penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. *Kecukupan (Adequacy)*: mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan masyarakat
4. *Kesamaan (Equity)*: menilai distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil
5. *Responsivitas (Responsiveness)*: mengukur kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan masyarakat
6. *Ketepatan (Appropriateness)*: menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai dan preferensi masyarakat

Setiap kriteria dioperasionalkan melalui indikator-indikator spesifik yang disesuaikan dengan konteks pengembangan kawasan industri untuk memastikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap dampak kebijakan bagi masyarakat Kecamatan Gondang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan merupakan inti dari penelitian yang

menyajikan temuan-temuan empiris berdasarkan analisis data lapangan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Pembahasan ini disusun secara sistematis untuk menjelaskan dampak sosial ekonomi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondanghadap masyarakat setempat.

Profil Kecamatan Gondang

Kecamatan Gondang merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Gondang terletak di bagian timur Kabupaten Sragen dengan posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, tepatnya dengan Kabupaten Ngawi. Kecamatan ini memiliki luas wilayah mencapai 46,95 km² dengan pusat pemerintahan berada di Kelurahan Bumiaji (Kecamatan Gondang Dalam Angka, 2024).

Wilayah administratif Kecamatan Gondang terdiri dari sembilan desa, yaitu Desa Bumiaji, Glonggong, Gondang, Kaliwedi, Plosorejo, Srimulyo, Tegalrejo, Tunggul, dan Wonotolo. Secara topografis, seluruh wilayah kecamatan ini berada di daerah dataran dengan ketinggian rata-rata 93 meter di atas permukaan laut, sehingga tidak terdapat desa yang terletak di wilayah pantai.

Batas wilayah Kecamatan Gondang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan

Sambungmacan, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Ngawi), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngrampal, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sidoharjo. Posisi geografis yang strategis ini menjadikan Kecamatan Gondang sebagai pintu gerbang utama Kabupaten Sragen dari arah timur, terutama dengan adanya akses jalan tol Trans-Jawa melalui exit Sambungmacan yang berdekatan dengan wilayah ini.

Kondisi Demografis

Berdasarkan data kependudukan tahun 2023, Kecamatan Gondang memiliki total penduduk sebanyak 48.811 jiwa yang terdiri dari 24.261 jiwa penduduk laki-laki dan 24.550 jiwa penduduk perempuan. Komposisi penduduk menunjukkan rasio jenis kelamin yang cukup seimbang dengan sedikit dominasi penduduk perempuan (Kecamatan Gondang Dalam Angka, 2024).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Gondang 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1.509	1.400	2.909
5-9	1.713	1.682	3.395
10-14	1.977	1.833	3.810
15-19	1.832	1.790	3.622
20-24	1.829	1.645	3.474
25-29	1.642	1.603	3.245
30-34	1.694	1.622	3.316

35-39	1.632	1.686	3.318
40-44	1.956	1.942	3.898
45-49	1.705	1.780	3.485
50-54	1.614	1.671	3.285
55-59	1.337	1.529	2.866
60-64	1.254	1.418	2.672
65-69	1.064	1.109	2.173
70-74	734	750	1.484
75+	769	1.090	1.859
Kecamatan Gondang	24.261	24.550	48.811

Sumber : Kecamatan Gondang Dalam Angka 2024

Struktur penduduk menunjukkan bahwa Kecamatan Gondang didominasi oleh penduduk usia produktif, dengan kelompok umur 40-44 tahun memiliki jumlah terbanyak sebesar 3.898 jiwa. Kelompok usia 10-14 tahun juga menunjukkan jumlah yang cukup besar dengan 3.810 jiwa, mengindikasikan potensi sumber daya manusia muda yang akan memasuki usia produktif dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi demografis ini sangat mendukung pengembangan kawasan industri karena tersedianya tenaga kerja dalam jumlah yang memadai.

Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kecamatan Gondang menunjukkan karakteristik wilayah yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Berdasarkan data tata guna lahan, sawah merupakan penggunaan lahan terbesar dengan luas 2.670,47 hektar atau sekitar 57,1% dari total luas wilayah. Pemukiman menempati

urutan kedua dengan luas 1.637,04 hektar atau 35,0% dari total luas wilayah.

Tabel 2 Jenis Dan Luas Penggunaan Lahan tahun 2015

No	Jenis Penggunaa n Lahan	Luas Lahan
1.	Sawah	2670.471
2.	Pemukiman	1637.036
3.	Tegalan	206.528
4.	Belukar	98.628
5.	Lahan Kosong	36.285
6.	Industri	29.88
Jumlah		4678.828

Sumber : diolah 2025

Data penggunaan lahan menunjukkan bahwa sektor industri saat ini baru mencakup 29,88 hektar atau 0,64% dari total luas wilayah kecamatan. Kondisi ini mengindikasikan masih tersedianya potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan kawasan industri, terutama dengan adanya lahan kosong seluas 36,29 hektar dan sebagian lahan tegalan yang dapat dialihfungsikan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

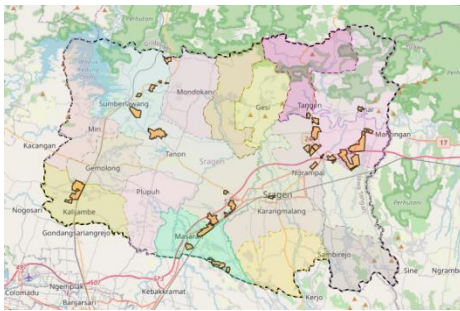
Potensi Industri Eksisting

Di kawasan pengembangan industri Kecamatan Gondang, telah beroperasi berbagai jenis industri yang mencakup beragam sektor dan bidang usaha. Data menunjukkan keragaman aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah tersebut, meskipun masih didominasi oleh industri kecil dan menengah.

Tabel 3 Jenis Industri di Kecamatan Gondang

Jenis	Jumlah
Industri barang dari kulit	-
Industri barang dari kayu	40
Industri barang dari logam mulia/bahan logam	-
Industri barang dari kain/tenun	25
Industri gerabah/keramik/batu	1064
Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bamboo, rumput, pandan, dll	14
Industri makan dan minuman	28
Industri lainnya	2
Total	1.173

Gambar 1 Peta Mapping Kawasan Industri Kabupaten Sragen



Sumber : RTRW Kabupaten Sragen

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri

Evaluasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang dilakukan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi,

kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap kriteria dianalisis berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci.

Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mengukur sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang, penilaian efektivitas difokuskan pada pencapaian tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan multiplier effect ekonomi.

Multiplier Effect dan Penciptaan Lapangan Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ariyanto, penatap perizinan ahlimuda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, diperoleh informasi bahwa:

"Manfaat ketika adanya Kawasan Industri itu banyak sekali dengan adanya Kawasan Industri maka terjadi multiplier effect. Yang pertama kesempatan lapangan pekerjaan jadi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan ketika adanya perusahaan tersebut. Yang kedua akan meningkatkan perekonomian wilayah sekitar di situ mungkin akan tumbuh warung makan, kos-kosan sehingga meningkatkan perekonomian sekitar" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Pernyataan ini dikuatkan oleh Bapak
Sadiman, Kasubbag Perencanaan di

Kantor Kecamatan Gondang, yang menyatakan:

"Ya, kebijakan pengembangan kawasan industri ini dapat dikatakan berhasil dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Keberadaan pabrik-pabrik baru telah membuka ribuan lowongan, tidak hanya bagi warga lokal yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan, tetapi juga dari luar daerah. Ini secara langsung berkontribusi pada penurunan angka pengangguran dan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah Gondang secara keseluruhan" (Sadiman, wawancara 14 Februari 2025).

Dampak multiplier effect ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Ibu Sukarni, warga setempat yang tidak terikat dengan industri, menuturkan:

"Kalau manfaat yang saya rasakan itu saya bisa bangun peluang usaha bisa mendirikan kos, kemudian masyarakat sekitar juga dapat peluang usaha seperti warung kelontong atau warung makan" (Sukarni, wawancara 14 Februari 2025).

Tantangan dalam Pencapaian Tujuan

Meskipun menunjukkan dampak positif, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan informasi dari DPMPTSP:

"Sampai saat ini itu belum maksimal karena kawasan yang disediakan itu hanya beberapa yang sudah beroperasi mungkin ada tiga atau empat jadi belum maksimal. Tiga perusahaan yang sudah beroperasi dan lainnya masih berupa lahan sawah sehingga manfaatnya belum begitu

signifikan untuk masyarakat sekitar" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Selain itu, dari perspektif pekerja, terdapat kekhawatiran mengenai stabilitas pekerjaan. Seorang karyawan pabrik menyampaikan:

"Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, karena perusahaan terkadang tidak stabil, kadang libur panjang. Kan itu juga dapat merugikan saya sebagai karyawan karena tidak ada penghasilan masuk" (Widya, wawancara 14 Februari 2025).

Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks pengembangan kawasan industri, efisiensi dinilai dari aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dampak lingkungan.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kawasan industri. Menurut informan dari DPMPTSP:

"Ya masyarakat itu terlibat dari awal penyusunan RTRW maupun RDTR itu dilibatkan. Di situ nanti akan dijadikan untuk kawasan peruntukan industri itu ada dengar pendapat atau public hearing atau konsultasi publik dengan masyarakat sehingga masukan-masukan dari masyarakat bisa langsung disampaikan" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Tokoh masyarakat juga mengonfirmasi keterlibatan ini:

"Masyarakat ikut dilibatkan dalam

pengembangan melalui konsultasi dan sosialisasi saat akan diberdirikan pabrik tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi terkait rencana yang akan diterapkan" (Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Namun, dari perspektif masyarakat umum, masih terdapat persepsi bahwa keterlibatan mereka terbatas. Seorang warga menyatakan:

"Sejauh ini, masyarakat merasa kurang terlibat dalam pengembangan kawasan industri. Karena kan kalau mau terlibat ya harus bekerja disitu" (Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Pengelolaan Lingkungan

Aspek pengelolaan limbah dan dampak lingkungan menunjukkan efisiensi yang baik. Informan dari masyarakat melaporkan:

"Kalau untuk limbah itu mereka mengolahnya sendiri kan pabrik disini itu pabrik textile, jadi tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar" (Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari karyawan pabrik:

"Limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut tidak langsung dibuang, tetapi melalui proses pengolahan. Limbah tersebut diolah dapat diubah menjadi bahan baku kapas. Setelah melalui tahap pengolahan ini, kapas yang dihasilkan kemudian dipasarkan dan dijual kembali" (Widya, wawancara 14 Februari 2025).

Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi, sosial,

dan lingkungan.

Ketersediaan Fasilitas Umum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas umum di sekitar kawasan industri dinilai sudah memadai. Menurut informan dari pemerintah:

"Sudah karena pabrik terletak di Jalan Utama jadi dekat dengan fasilitas kesehatan kemudian memudahkan mobilitas masyarakat juga untuk ke mana-mana" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Tokoh masyarakat juga mengonfirmasi:

"Secara umum, kami mengamati bahwa fasilitas umum di sekitar kawasan industri sudah cukup mendukung kehidupan masyarakat. Akses yang baik ke jalan utama dan keberadaan klinik kesehatan memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari" (Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pengembangan kawasan industri telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Informan dari DPMPTSP menjelaskan:

"Pendapatan masyarakat sekitar kawasan industri sudah pasti mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, dengan adanya industri baru yang beroperasi, tercipta berbagai lapangan kerja yang sebelumnya tidak ada. Kedua, peningkatan pendapatan ini juga dipengaruhi oleh adanya peluang usaha baru yang muncul di sekitar kawasan industri" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Hal ini dibuktikan secara nyata oleh pengalaman masyarakat:

"Keberadaan kawasan industri ini sangat menguntungkan dan jelas meningkatkan pendapatan. Kebetulan saya memiliki usaha kos-kosan, dan sejak pabrik beroperasi, permintaan kamar kos melonjak karena banyaknya karyawan yang datang dari luar daerah" (Sukarni, wawancara 14 Februari 2025).

Kesamaan (Equity)

Kesamaan berkaitan dengan distribusi manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Akses Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tidak ada diskriminasi dalam akses pekerjaan antara masyarakat lokal dan pendatang. Namun, terdapat sistem kuota yang memberikan prioritas kepada masyarakat lokal. Menurut informan dari DPMPTSP:

"Ada biasanya perusahaan itu ada kuota tersendiri untuk masyarakat lokal berapa persen dan untuk yang dari luar berapa persen kalau yang dari luar biasanya berdasarkan skill khusus itu ngambilnya dari luar daerah biasanya di dokumen juga ada untuk mengakomodir penduduk lokal berapa persennya tetapi secara proporsional banyak masyarakat lokal" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Namun, dari perspektif masyarakat, masih terdapat persepsi tentang adanya faktor lain yang mempengaruhi keadilan akses:

"Banyaknya akses pekerjaan di kawasan industri memang ada, tetapi saya rasa ada faktor lain yang membuatnya tidak sepenuhnya adil. Misalnya, jika seseorang memiliki orang dalam di

perusahaan, mereka cenderung lebih mudah mendapatkan posisi yang mereka inginkan" (Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Distribusi Manfaat

Manfaat kawasan industri dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Informan dari DPMPTSP menyatakan:

"Pemerintah dengan mengizinkan berdirinya industri tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat karena ingin mensejahterakan masyarakat. Sragen pertaniannya juga bagus tapi industrinya yang kurang makanya sekarang banyak anak muda yang malu untuk bertani maka pemerintah memberikan alternatif untuk menyediakan lahan untuk sektor industri" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah dan pengelola industri untuk merespons keluhan, masukan, dan kebutuhan masyarakat secara efektif.

Mekanisme Pengaduan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah tersedia mekanisme pengaduan yang jelas dan berjenjang. Menurut informan dari DPMPTSP:

"Ada jadi masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui perusahaan langsung. Kalau perusahaan belum dapat menyelesaikan mungkin nanti ditaruh pemerintahan terendah melalui RT atau RW kalau tidak bisa Kelurahan kalau belum bisa lagi bisa ke Camat kalau nggak bisa menyelesaikan bisa ke tingkat kabupaten tapi pengaduan sesuai dengan hierarki dahulu" (Ariyanto, wawancara 20

Februari 2025).

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan mekanisme ini masih rendah. Menurut tokoh masyarakat:

"Sejauh ini tidak ada respon ya, karena kami disini juga belum pernah mendapat keluhan, kalau ada keluhan biasanya mereka datang ke kantor tapi ini tidak ada" (Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Bahkan di tingkat internal perusahaan, mekanisme saran belum berfungsi optimal:

"Sebagai karyawan, saya memang kurang tahu bagaimana masyarakat umum menyampaikan keluhan mereka. Namun, di dalam pabrik sendiri, kami sebenarnya punya kotak saran. Sayangnya, kotak saran itu sepertinya tidak pernah dibuka atau ditindaklanjuti" (Widya, wawancara 14 Februari 2025).

Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat

Kebijakan pengembangan kawasan industri dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut informan dari DPMPTSP:

"Yang pastinya disana harga jual tanah sekitarnya naik, perekonomiannya naik, pekerjaan meningkat dan banyak, itu yang jelas kemudian tambah perekonomian. Banyak kos-kosan, warung makan, dan toko-toko untuk kebutuhan karyawannya" (Ariyanto,

wawancara 20 Februari 2025).

Tokoh masyarakat juga mengonfirmasi kesesuaian ini:

"Pengembangan kawasan industri ini kan salah satunya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan potensi ekonomi. Jadi itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan" (Tokoh Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Kesesuaian dengan Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kebijakan ini juga dinilai sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Menurut informan dari DPMPTSP:

"Ya karena dalam penyusunan RTRW itu ada kajian naskah akademiknya tentunya sudah sesuai karena kalau tidak sesuai tentunya tidak menjadi produk hukum alih fungsi dari pertanian menjadi industri itu dilihat dampak positif atau negatifnya itulah nanti baru ditetapkan" (Ariyanto, wawancara 20 Februari 2025).

Masyarakat juga merasakan kesesuaian kebijakan dengan kondisi mereka:

"Saya merasa kebijakan yang diambil sudah cukup sesuai, karena adanya peningkatan lapangan kerja dan akses ke fasilitas umum" (Masyarakat, wawancara 14 Februari 2025).

Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang telah memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Dampak Ekonomi Positif

1. **Penciptaan Lapangan Kerja:** Kawasan industri telah membuka ribuan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan pendatang, berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
2. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat:** Adanya industri telah meningkatkan pendapatan masyarakat baik secara langsung melalui upah pekerja maupun tidak langsung melalui peluang usaha pendukung.
3. **Multiplier Effect:** Keberadaan industri telah mendorong tumbuhnya usaha-usaha pendukung seperti kos-kosan, warung makan, toko kelontong, dan jasa laundry yang memberikan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat.
4. **Peningkatan Nilai Tanah:** Harga tanah di sekitar kawasan industri mengalami kenaikan yang menguntungkan pemilik lahan lokal.

Dampak Sosial

1. Dinamika Komunitas:

Kawasan industri telah mengubah dinamika sosial masyarakat dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan interaksi antar daerah.

2. Peningkatan Akses Fasilitas

Lokasi strategis kawasan industri dekat dengan jalan utama dan fasilitas kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

3. Perubahan Pola Mata Pencarian

Terjadi diversifikasi mata pencarian dari yang sebelumnya dominan pertanian menjadi lebih beragam dengan adanya sektor industri.

Tantangan dan Permasalahan

1. Ketidakstabilan Pekerjaan

Beberapa perusahaan mengalami fluktuasi produksi yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pekerja.

2. Partisipasi Masyarakat Terbatas

Meskipun telah ada mekanisme konsultasi publik, sebagian masyarakat masih merasa kurang terlibat dalam proses pengembangan.

3. Implementasi Belum Optimal

Dari kawasan yang telah ditetapkan, baru sebagian kecil yang beroperasi sehingga manfaat belum dirasakan secara maksimal.

Berdasarkan analisis komprehensif menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, kebijakan ini secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang Kabupaten

Sragen menggunakan enam kriteria William N. Dunn menghasilkan temuan yang mencerminkan keberhasilan implementasi dengan beberapa catatan perbaikan. Analisis komprehensif terhadap dampak sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan kontribusi signifikan bagi transformasi ekonomi lokal.

Dari perspektif efektivitas, kebijakan berhasil menciptakan efek berganda positif melalui pembentukan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai sektor pendukung. Meskipun pencapaian belum optimal akibat terbatasnya jumlah perusahaan operasional, dampak awal telah terasa dalam peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Aspek efisiensi menunjukkan adanya mekanisme partisipasi publik yang telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dalam hal pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis pembangunan.

Tingkat kecukupan kebijakan tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar infrastruktur dan layanan publik, serta terciptanya diversifikasi sumber pendapatan bsamaan, meskipun terdapat sistem kuota yang mengutamakan masyarakat lokal, masih diperlukan pengawasan untuk memastikan akses yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Responsivitas pemerintah telah terwujud melalui penyediaan jalur pengaduan berjenjang, namun pemanfaatan mekanisme ini masih

rendah karena minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Aspek ketepatan menunjukkan kesesuaian tinggi antara kebijakan dengan kebutuhan pembangunan daerah, terbukti dari peningkatan nilai ekonomi tanah dan pertumbuhan sektor usaha mikro.

Transformasi sosial ekonomi yang terjadi mencakup pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian tradisional menuju diversifikasi ekonomi yang lebih modern. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi industrialisasi yang berkelanjutan dan bermartabat.

Penelitian ini merekomendasikan percepatan operasionalisasi kawasan industri yang belum beroperasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, peningkatan sosialisasi jalur pengaduan, serta implementasi sistem monitoring berkelanjutan untuk memastikan stabilitas manfaat ekonomi bagi seluruh stakeholder. Kebijakan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gondang telah membuktikan potensinya sebagai katalisator pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2024). *Kabupaten Sragen dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Sragen. <https://sragenkab.bps.go.id/id/publication/2024/>

- [02/28/e01f958a1e2e72be248d229c/kabupaten-sragen-dalam-angka-2024.html](https://doi.org/10.28250/ji@p.v15n1.2026.02/28/e01f958a1e2e72be248d229c/kabupaten-sragen-dalam-angka-2024.html)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2024). *Kecamatan Gondang dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Sragen.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2024). *Statistik daerah Kabupaten Sragen 2024*. BPS Kabupaten Sragen. <https://sragenkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/27/8593c30d495df18f51f0d5fc/statistik-daerah-kabupaten-sragen-2024.html>
- Blomkamp, E., Sholikin, M., Lewis, J. M., & Toumbourou, T. (2017). *Understanding policymaking in Indonesia: In search of a policy cycle*. Policy Lab (The University of Melbourne) and Indonesian Centre for Law and Policy Studies (PSHK). <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/08/Understanding-Policy-Making-in-Indonesia-PSHK.pdf>
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis: An integrated approach* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315663012>
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Luthfiah, F., Guswandi, G., & Anggrahita, H. (2023). The role of city spatial plan (RTRW) on regional development in Depok City (West Java Province). *Indonesian Journal of Geography*, 55(2), 320-329. <https://doi.org/10.22146/ijg.65987>
- Mahendra, J. R., & Aldyan, R. A. (2024). Examining Indonesian government policies in tackling deforestation: Balancing economy and environment. *Journal of Law and Emerging Justice*, 2(1), 93-102. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.93>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040. <https://jdih.sragenkab.go.id/adm/file/PERDA%20NO%204%20TH%202020.pdf>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro. <https://peraturan.go.id/files/perda-kabupaten-sragen-no-6-tahun-2023.pdf>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiqurokhman, Sulastri, E., Setiawan, A., Dewi, M. P., & Sumarni, L. (2024). Indonesian government policy innovation encouraging democracy of media development. *Antasena: Journal of Public Administration and Governance Studies*, 2(2), 104-118. <https://doi.org/10.61332/antasena.v2i2.218>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.